

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Di Indonesia, kajian tentang pendidikan multikultural belum banyak dilakukan. Ada beberapa praktisi dunia pendidikan yang melakukan kajian terhadap pendidikan multikultural, antara lain HAR Tilaar, Ainul M. Yaqin, Choirul Mahfud, Ngainum Yakin dan Achmad Sauqi. Dari sekian nama tersebut, beberapa di antaranya mengarahkan pendidikan multikultural di Indonesia pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Di bidang pendidikan agama, kajian tersebut masih tergolong cukup langkah. Walaupun agak jarang, namun di bidang Pendidikan Agama Islam relatif sudah cukup tersedia kajian-kajian tersebut. Sebaliknya, pendidikan multikultural yang diterapkan pada Pendidikan agama Kristen dan Katolik sangat jarang ditemukan referensinya, kalau bisa dikatakan belum ada sama sekali.

Profesor H.A.R. Tilaar dalam buku *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan*" menguraikan gagasan-gagasan dasar tentang pendidikan multikultural serta sejarah perkembangan pendidikan multikultural di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan. Di dalamnya juga berisikan kajian-kajian historis akan sejarah lahir dan berkembangnya paham multikulturalisme.

Multikulturalisme, oleh HAR Tilaar, merupakan modal sosial untuk mewujudkan visi nasionalisme Indonesia baru yang erat berkaitan dengan konsep nasionalisme dan identitas nasional Indonesia. Pada tahap ini, pendidikan

<sup>20</sup> H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2005), 216-232.

memainkan peran signifikan yakni sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila, yakni Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan identitas nasional Indonesia. Visi nasionalisme Indonesia baru adalah Indonesia yang bersatu dan demokratis serta menghargai dan menghormati HAM.

Dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis dan menghormati HAM, maka pola pedagogik yang diperlukan oleh masyarakat multikultural Indonesia adalah pedagogi kesetaraan (*equity pedagogy*). Dalam pendidikan kesetaraan, kita menghormati kesetaraan dari berbagai berbagai jenis budaya dalam masyarakat Indonesia, kesetaraan di dalam kehidupan bersama dalam mengurangi gap yang semakin menonjol antara yang kaya dan yang miskin, kesetaraan gender, dan kesetaraan dalam kesempatan memperoleh pendidikan. Pada dasarnya pendidikan kesetaraan berasaskan pada konsep kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) seperti yang dikemukakan oleh Charles Taylor, tercipta suatu kondisi yang memungkinkan setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama dalam komunitas. Politik pengakuan ini mencakup pengakuan akan kesetaraan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.

HAR Tilaar mengidentifikasi lima program prioritas dalam pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia yakni pembentukan lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat kebudayaan, pendidikan kewargaan, kurikulum pendidikan multikultural, kebijakan perbukuan dan informasi, dan pendidikan guru. Dalam menjalankan lima program prioritas ini harus didasarkan

pada paling kurang tiga prinsip dasar penyusunan, yakni pertama pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogik kesetaraan (*equaty pedagog*). Kedua, pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia cerdas. Manusia Indonesia cerdas dicirikan dengan, pertama, manusia yang cerdas-pandai (*educated*) yang diindikasikan oleh kemampuan analitis, kemampuan menentukan pilihan, menguasai ilmu pengetahuan dan gemar belajar. Kedua, manusia yang energik-kreatif yang diindikasikan dengan adanya daya kreatif, rajin, kerja keras dan tahan uji. Ketiga, manusia yang responsif terhadap masyarakat demokratis, yang diindikasikan dengan toleransi terhadap perbedaan, memiliki semangat persatuan Indonesia yang pluralistik, dan bersifat inklusifisme. Keempat, manusia yang ber-daya guna (*skilled*) yang diindikasikan oleh adanya keterampilan yang bermanfaat dan kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya alam Indonesia. Kelima, manusia yang memiliki akhlak mulia (moral, religius), yang diindikasikan oleh sikap anti korupsi, antikorupsi dan antinepotisme. Keenam, manusia yang memiliki sopan santun, yang diindikasikan oleh mengenal adat-istiadat setempat dan mengenal tata cara pergaulan internasional.

Ainul M. Yaqin dalam buku Pendidikan Multikultural<sup>21</sup> menyatakan bahwa krisis multidimensi yang dialami negara Indonesia, diakui ataupun tidak, disebabkan oleh kegagalan mengelola perbedaan kultural yang ada di Indonesia. Krisis multidimensi ini muncul dalam rupa berbagai bentuk diskriminasi, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM yang terus menerus terjadi di Indonesia yang dalam prakteknya terejawantah dalam bentuk kriminalitas, korupsi, politik \*<sup>15</sup>

---

<sup>21</sup> Ainul M. Yaqin, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), h. 1-15.

uang, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengesampingan hak-hak minoritas, pengesampingan terhadap nilai-nilai budaya lokal, kekerasan antar pemeluk agama, dan sebagainya.

Salah satu upaya preventif untuk membangun kesadaran dan pemahaman generasi mendatang akan pentingnya untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemanusiaan dan pluralisme dalam pergaulan di dalam masyarakat yang mempunyai latarbelakang kultural yang beragam, seperti Indonesia, adalah melalui penerapan pendidikan multikultural. Melalui pendidikan multikultural diharapkan bahwa institusi pendidikan formal Indonesia, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dapat menghasilkan lulusan sekolah atau universitas yang tidak hanya mempunyai kemampuan kognitif (pengetahuan), dan psikomotorik (keterampilan), melainkan juga sikap (afektif), yang demokratis, humanis, pluralis dan adil.

Isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan multikultural menurut M. Ainul Yaqin dapat dijelaskan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut: bagaimana membangun dan mewujudkan paradigma keberagaman yang inklusif (pada konteks pendidikan agama), bagaimana membangun kesadaran dan pemahaman untuk membangun sikap sensitif gender, bagaimana membangun sikap saling menghargai keragaman bahasa, perbedaan kemampuan dan perbedaan umur, bagaimana membangun pemahaman kritis terhadap ketidakadilan dan perbedaan status sosial, dan bagaimana membangun sikap anti diskriminasi etnis? Rekomendasi yang diberikan penulis melalui pengkajian buku ini adalah perlunya penulisan dan publikasi buku pendidikan multikultural yang

lebih spesifik seperti manajemen pendidikan multikultur, administrasi pendidikan multikultur, kurikulum pendidikan multikultur, serta strategi belajar mengajar multikultural, dan pentingnya isu pendirian pusat studi pendidikan multikultural atau bahkan menyusun dan menciptakan program studi (mata pelajaran) pendidikan multikultur. Selain itu perlu juga diadakan seminar, workshop atau bahkan pelatihan pendidikan multikultur dan perlunya dialog dan dukungan dari para ahli lintas disiplin ilmu, karena kajian pendidikan multikultural merupakan kajian interdisiplin ilmu.

Choirul Mahfud dalam buku *Pendidikan Multikultural*<sup>22</sup> menguraikan upaya dari penulisnya untuk memberi kajian pendidikan multikultural pada konteks Indonesia. Urgensi pendidikan multikultural di Indonesia (yang diibaratkan seperti mozaik yang kaya akan keanekaragaman) adalah pertama, sebagai sarana alternatif pemecahan konflik baik konflik vertikal maupun horisontal dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia seharusnya melihat perbedaan dan keanekaragaman tersebut sebagai sebuah aset bangsa, bukan sebagai sumber perpecahan. Kedua, supaya siswa tidak tercerabut dari akar budaya (dalam hal merespons dan berpartisipasi dalam gelombang globalisasi). Siswa diharapkan melalui pendidikan multikultural dapat diberi pengenalan akan keanekaragaman budaya, baik keragaman pada tingkat lokal dalam negeri Indonesia, maupun pada tingkat internasional dunia. Ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Dalam melakukan pengembangan kurikulum sebagai titik tolak dalam proses belajar mengajar, atau guna memberikan sejumlah

---

<sup>22</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 16-25.

materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai siswa dengan ukuran dan tingkatan tertentu, maka pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi bersifat unggul. Keempat, sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultural. Hal ini bertolak dari cita-cita reformasi Indonesia untuk membangun Indonesia baru. Inti dari cita-cita ini adalah terwujudnya sebuah masyarakat sipil yang demokratis, ditegakkannya hukum untuk supremasi keadilan, pemerintah bebas KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia.

Secara khusus, buku ini diarahkan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal pengelolaan konflik yang muncul dalam masyarakat majemuk Indonesia. Penulis mengambil contoh potret diskriminasi etnis Tionghoa. Mahfud berpendapat bahwa konflik yang diawali dengan semangat egosentrisme, etnosentrisme dan chauvinisme membentuk sebuah klaim kebenaran (*truth claim*). Dalam relasi sosial, gesekan antara klaim kebenaran (*truth claim*) inilah yang menimbulkan konflik. Oleh Mahfud, klaim kebenaran ini disebut sebagai sebuah bentuk kelainan jiwa yang bernama narsisme. Narsisme berarti seseorang atau kelompok masyarakat menganggap dirinya paling sempurna jika dibandingkan dengan yang lainnya.

Melalui gagasan pendidikan multikultural, oleh Choirul Mahfud, dinilai dapat mengakomodir kesetaraan dalam perbedaan. Prinsip-prinsip dasar dalam multikulturalisme diharapkan dapat memberikan ruang yang luas bagi berbagai

identitas kelompok untuk melaksanakan kehidupan secara otonom. Dengan demikian, akan tercipta suatu sistem budaya dan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang akan menjadi pilar kedamaian bangsa.

Ngainum Yaqin dan Achmad Sauqi dalam buku Pendidikan Multikultural<sup>23</sup> melakukan kajian terhadap pendidikan multikulturalisme dan urgensi pengembangannya bagi konteks Indonesia. Pengembangan pendidikan multikulturalisme di Indonesia secara khusus dikaji dari perspektif doktrin dan ajaran Islam. Pendidikan multikultural yang menekankan asas keberagaman inklusif (melawan asas keberagaman eksklusif) dilihat sesuai dengan asas keislaman untuk dikembangkan pada konteks Indonesia yang majemuk. Hasil dari pengkajian buku ini adalah rekomendasi untuk melakukan re-orientasi penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam menjadi pendidikan yang berwajah multikultural dengan memberi penekanan pada bagaimana evaluasi hidup islami pada konteks Indonesia yang plural serta pemantapan kurikulum pluralis-multi kultural.

Praktek dalam pendidikan agama yang cenderung bersifat pengajaran yang didominasi oleh pemahaman tekstual ajaran agama yang dogmatis dan eksklusif menjadi kritikan dari kajian dalam buku ini. Karena implikasi dari pola pengajaran pendidikan agama semacam ini akan membentuk cara pandang peserta kelas pendidikan agama yang cenderung melihat penganut agama berbeda sebagai pihak yang salah, dan karenanya harus “dikalahkan.” Pada kondisi ini, sedikit banyaknya, pendidikan justru menyumbang dan memperumit konflik yang terjadi

---

<sup>23</sup> Ngainum Naim dan Achmad Sauqi, *Konsep dan Aplikasi Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Penerbit AM, 2008), 10-15.

dalam interaksi antar penganut agama. Di sinilah Pendidikan Multikulturalisme dibutuhkan dalam rangka pengembangan Pendidikan agama yang berwawasan pluralis-multikultural.